

Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Digital Kepemimpinan Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende

Maria Lisa Wanda Ndoka¹, Petrus E. De Rozari², ProPetrus Kase³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana

Jalan Adi Sucipto 85228 Kupang East Nusa Tenggara

Email: mariandoka25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, keualitas sumber daya manusia, dan system informasi keuangan daerah terhadap efektivitas kinerja. Dengan metode penelitian kuatatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner likert dan responden dalam penelitian ini berjumlah 75 orang, yang tersebar pada 24 populasi di Lokasi penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende. Hasil penelitian jika dilihat dari nilai signifikan maka pada hubungan X1 dan y terdapat $0,003 < 0,05$ sehingga dinyatakan variabel X1 atau perencanaan anggaran berpengaruh pada efektifitas pekerjaan. Pada variabel X2 dinyatakan $0,001 > 0,05$ sehingga variabel X2 atau sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan pada efektivitas pekerjaan. Selain itu pada variabel X3 dinyatakan $0,00 < 0,05$ sehingga X3 yaitu system informasi keuangan daerah dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja. Jika dilihat dari nilai t hitung dan t tabel maka untuk variabel x1 t hitung sebesar $2,846 > 0,264$ sehingga dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan. Pada t hitung X2 nilainya $3,922 > 0,264$ sehingga dinyatakan berpengaruh, dan pada X3 nilainya $5,534 > 0,264$ dinyatakan berpengaruh system informasi keuangan terhadap efektivitas kerja.

Kata kunci: Perencanaan Anggaran, Sumberdaya Manusia, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kabupaten Ende

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of budget planning, human resource quality, and regional financial information systems on performance effectiveness. With a quantitative research method and data collection techniques using a Likert questionnaire, respondents in this study amounted to 75 people, spread across 24 populations in the research location, namely the Regional Financial and Asset Management Agency of Ende Regency. The study's results, if viewed from the significance value, the relationship between X1 and y is $0.003 < 0.05$, so it is stated that the variable X1 or budget planning affects work effectiveness. In the variable X2, it is stated that $0.001 > 0.05$ so that the variable X2 or human resources significantly affects work effectiveness. In addition, the variable X3 is stated that $0.00 < 0.05$ so that X3, namely the regional financial information system, is said to affect work effectiveness significantly. If seen from the calculated t value and t table, for the variable x1, the calculated t is $2.846 > 0.264$, so it is stated to have a significant effect. The t-test for X2 is $3.922 > 0.264$, indicating an effect. The t-test for X3 is $5.534 > 0.264$, indicating an impact of the financial information system on work effectiveness.

Keywords: Budget Planning, Human Resources, Regional Financial Information System, Ende Regency

Pendahuluan

Organisasi Perekonomian pada Kabupaten Ende lebih tinggi dibandingkan dengan regional di Provinsi NTT. Pembangunan daerah merupakan serangkaian proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah. Dalam rangka menjaga konsistensi pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Tahap perencanaan pembangunan daerah sendiri dibagi secara

jangka panjang, jangka menengah, serta rencana kerja pemerintah daerah. Untuk menindaklanjuti rencana pembangunan daerah pemerintah daerah, disusunlah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) oleh pemerintah daerah guna memberikan gambaran akan pembangunan daerah. Tuntutan transparansi mendorong adanya pengukuran atau penilaian kinerja di instansi pemerintah daerah, hal ini menjadi sorotan publik karena semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik (Pemerintah Kabupaten Ende, 2025).

Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan memang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah di masa yang akan datang. Salah satu solusi yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dan integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ende Telah Melakukan Kerjasama Dengan OPD Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ende yaitu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga (DISPAREKRAFBUDPORA), Dinas Perhubungan (DISHUB), Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Komunikasi Dan Informasi (DISKOMINFO), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta masih banyak OPD lainnya. Kerjasama merupakan pokok yang penting dalam penguatan lembaga, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dengan adanya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) akan berpengaruh pada efektivitas program kegiatan dimana anggaran dapat terserap secara optimal.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dalam merencanakan rumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mencakup mulai dari menyusun rancangan APBD/ perubahan APBD, menetapkan APBD, melaksanakan APBD, membuat tatanan usaha APBD, akuntansi keuangan dan aset daerah, menanggungjawabkan pelaksanaan APBD, membina dalam urusan administrasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota dan membina pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam mendukung pelaksanaan tugas yang telah disebutkan tadi BPKAD terdapat peraturan Gubernur NTT Nomor 123 Tahun 2018 yang akan menjelaskan lebih rinci tentang fungsi, yaitu : a). Menyusun kebijakan teknis dalam mempersiapkan bahan kebijakan dan dasar penyusunan APBD. b). Menerbitkan dan memberi persetujuan untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP). c). Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). d). Melaksanakan proses usulan penunjukan pengelola keuangan daerah . e). Melaksanakan sistem akuntansi dan mengevaluasi pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan di bidang keuangan. f). Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPKAD selain sebagai SKPD yang harus membuat dan menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang juga sebagai PPKD yang tugasnya melakukan konsolidasian, konsolidasian pada pelaporan ini berbeda dengan konsolidasian yang diadakan oleh perusahaan swasta karena pada pelaksanaan dipemerintahan tidak hanya konsolidasi antara induk dan cabang. Konsolidasi yang dimaksudkan oleh PSAP 11 paragraf 17 yakni Laporan konsolidasi merupakan suatu laporan keuangan gabungan keseluruhan laporan keuangan SKPD sehingga tersaji sebagai satu laporan tunggal yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh SKPD yang secara *organisatoris* berada dibawahnya dengan atau tanpa mengeleminasi akun timbal balik. dari penjelasan tentang konsolidasi yang menghasilkan laporan konsolidasi , BPKD telah melakukan pengelolaan keuangan daerah provinsi sesuai PSAP nomer 71 tahun 2010 dengan melakukan rekap laporan keuangan dari seluruh SKPD yang ada di Provinsi NTT yang akan dijadikan satu dan selanjutnya disebut Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT.

Salah satu evaluasi atau penilaian atas kinerja pemerintah dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab dalam membagikan laporan keuangan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, memperhitungkan keadaan serta hasil operasional, memastikan tingkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terpaut dengan permasalahan keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efektivitas. Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik bisa dijadikan evaluasi atau penilaian dan pemulihan kinerja dengan membandingkan skema kerja penerapannya. Tidak hanya itu pula bisa digunakan sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Kinerja karyawan yang tinggi merupakan salah satu syarat dalam pencapaian tujuan kantor. Penilaian kinerja juga sangat penting, dengan adanya penilaian kinerja dapat dilihat perkembangan

kinerja karyawan dan apabila ada masalah dapat diidentifikasi dan dicari solusi karena kinerja pegawai menggambarkan produktivitas suatu organisasi. Kinerja pegawai sebagai tujuan akhir dan merupakan cara manajer untuk memastikan bahwa aktivitas karyawan dan output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan organisasi (Felicia, 2018)

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yang tidak sesuai harapan instansi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai diantaranya adalah motivasi kerja dan kepuasan kerja. Salah satu motivasi kerja yang menjadi pendorong untuk meningkatkan kinerja yaitu eksistensi meliputi kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan materi, lapar, rasa haus, rasa aman dan lingkungan kerja. Kebutuhan eksistensi di badan keuangan daerah Kabupaten Pelalawan, Pegawai merasa kebutuhan rasa aman dalam bekerja seperti tidak takut dipecat karena pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil. Akan tetapi kebutuhan interpersonal seperti kurangnya komunikasi antar pegawai yang menyebabkan mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Kemudian kebutuhan *growth* (pertumbuhan) seperti pegawai bekerja begitu-begitu saja tidak ada perubahan atau peningkatan yang menyebabkan mereka malas untuk bekerja.

Berdasarkan observasi dengan survei langsung di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende, diketahui bawah Renstra BPKAD Kabupaten ende sebagai perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang pengelolaan keuangan daerah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun kinerja BPKAD Kabupaten ende bisa dilihat dari pencapaian yang belum memenuhi target. Data pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Data Pencapaian Kinerja Pelayanan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	27.113.228.751	20.830.745.982	76,83%
2021	31.206.484.670	23.579.247.677	75,56%
2022	39.614.720.227	27.891.328.216	70,41%
Jumlah	97.934.433.648	72.201.321.875	222,8%
Rata - Rata	32.644.811.216	24.100.440.625	74,27%

Sumber: BPKAD Kabupaten Ende, 2025.

Dari tabel diatas dapat kita lihat tingkat kinerja pegawai mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini dilihat pada tabel 1.1 jumlah realisasi anggaran terjadi penurunan setiap tahunnya. Permasalahan utama di badan keuangan daerah, kurangnya kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan dan barang daerah di Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelola keuangan dan barang daerah. Hal ini yang menyebabkan terjadi banyak kesalahan atau kekeliruan dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah. Oleh sebab itu penulis memfokuskan penelitian pada bagian pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Ende.

Selain itu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Menurut (Abdul, 2014), faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah persaingan sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia ini berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Namun, sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya dengan pengembangan teknologi yang diterapkan tanpa dukungan sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia akan bekerja dengan segala kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi. Jika pemerintah memiliki kompetensi personal yang baik, maka proses pengalokasian anggaran di satuan kerja perangkat daerah (RPU) akan dikuasai dengan baik. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 mengenai pengukuran dan evaluasi pelaksanaan anggaran terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Tujuan dari penilaian kognitif kinerja adalah untuk menjalankan fungsi akreditasi serta akuntabilitas, yaitu untuk menetapkan dan memelihara standar profesional bagi pengguna anggaran.

Pentingnya efektivitas dalam pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pertanggungjawaban atau pelaporan anggaran akan berdampak pada akuntabilitas pemerintah yang berhubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan anggaran yang efektif ini juga yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Ende. Efektifitas kinerja pemerintah menjadi tolok ukur dalam penyerapan anggaran untuk menggerakkan roda perekonomian. Tingkat penyerapan anggaran selalu menjadi topik penting yang sering dibicarakan pengamat ekonomi sebagai bukti kegagalan birokrasi. Kegagalan untuk memenuhi target alokasi anggaran dapat mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena tidak semua dana akan dicairkan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah (Rahayu, 2020). Untuk mengetahui pemerintah daerah telah

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap program yang telah disusun dapat di amati pada tingkat penyerapan anggaran (Fajar & Arfan, 2017).

Selain perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pegawai negeri sipil sebagai aparat pengelolaan keuangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahardjo (2011) bahwa belum maksimalnya penyerapan penggunaan anggaran APBD oleh beberapa SKPD menunjukkan bahwa SKPD tersebut belum mampu memaksimalkan sumber daya manusianya. Peranan sumber daya manusia dalam instansi pemerintah sangatlah penting karena penggerak utama seluruh kegiatan atau aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya baik untuk memperoleh keuntungan maupun untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi adalah manusia. Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi organisasi dimulai dari usaha manusia itu sendiri dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara maksimal. Dengan kata lain kinerja organisasi sangat dipengaruhi dan bahkan tergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Selain itu, dalam era digital terdapat beberapa ketrampilan yang harus dimiliki pemimpin, yaitu kemampuan komunikasi baik secara langsung maupun melalui bantuan teknologi, berpikiran terbuka termasuk terbuka terhadap kemajuan teknologi, tanggap terhadap perubahan termasuk perubahan teknologi, dan berani mengambil risiko. Kepemimpinan digital merujuk pada gaya kepemimpinan yang berfokus pada penerapan transformasi digital di dalam suatu organisasi. Model kepemimpinan ini memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk melakukan digitalisasi pada lingkungan kerja dan budaya kerja mereka. Kepemimpinan diilustrasikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Untuk menjaga keunggulan kompetitif yang berlanjut, perusahaan perlu memiliki produk dan sistem teknis yang mendukung dan mempercepat proses produksi, komunikasi, dan efisiensi biaya, serta kemampuan untuk menggunakan produk dan sistem tersebut secara efektif. (Uğural, M. N., Giritli, H., & Urbański, 2020).

Salah satu faktor daya serap anggaran yang lambat di pengaruhi oleh tidak adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran. Menurut Halim (2012) dalam Maulana Yusuf (2016) penggunaan teknologi informasi adalah suatu keharusan yang akan semakin membantu tugas-tugas para pengelola keuangan daerah dalam menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 terkait penggunaan aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan kualitas akan selalu terkait dengan pelaksanaan suatu program. Berdasarkan pra observasi masih terdapat beberapa pengelola keuangan daerah yang belum menguasai sistem informasi keuangan daerah yang disebabkan oleh perubahan jenis aplikasi ari tahun ke tahun dimana satu aplikasi belum sepenuhnya dikuasai kemudian muncul aplikasi baru lagi sehingga masih ada pengelola keuangan daerah yang mengkombinasikan antar aplikasi dengan metode pelaporan keuangan yang masih manual.

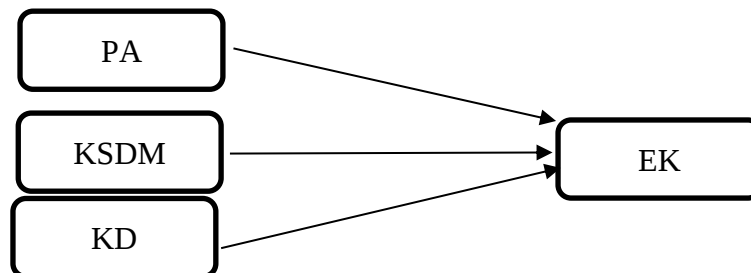
Banyak peneliti telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Perencanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju. Sebuah studi yang dilakukan (Firmawaty Sewang, 2021) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang dilaksanakan dengan baik akan berpengaruh dalam upaya peningkatan kinerja keuangan daerah di kabupaten Mamuju. Kualitas SDM yang kompeten di bidang keuangan akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamuju. Optimalisasi penerapan sistem informasi keuangan di lingkup pemerintahan kabupaten Mamuju terbukti dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian (Dewi et al., 2017) yang menemukan bahwa variabel keterampilan sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan anggaran. Kajian Halim (2018) menunjukkan bahwa faktor perencanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan anggaran.

Berdasarkan beberapa penelitian dengan hasil yang berbeda, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas perencanaan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah yang diukur dari penggunaan anggaran. Hasil penelitian disajikan dalam laporan abstrak berjudul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Digital Kepemimpinan Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende”**

Metode Penelitian

Sugiyono (2019), mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang membuahkan hasil berupa temuan-temuan yang didapatkan dengan cara melakukan suatu prosedur atau

metode statistika yang berasal dari pengukuran. Pendekatan kuantitatif digunakan pada penelitian ini dikarenakan setiap variabel yang diamati dapat diidentifikasi yang mana menggunakan suatu perhitungan yang sistematis dan dapat memberikan kejelasan hubungan antara variabel. Penelitian ini bertempat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu daftar pernyataan yang disusun secara tertulis yang bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban para responden. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu minimum skor 1 dan maksimum skor 5, dikarenakan akan diketahui secara pasti jawaban responden, apakah cenderung kepada jawaban yang setuju maupun yang tidak setuju. Sehingga hasil jawaban responden diharapkan lebih relevan, Sugiyono (2014:58). Penentuan populasi kali ini berdasarkan kriteria Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Ende berjumlah 24 OPD yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (DISPAREKRAFUDPORA), Dinas Perhubungan (DISHUB), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Pertanian, Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERPUSSIP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas KB, PP dan PA (KBPPPA), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG), Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER), Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pendidikan (DISPENDIK), Dinas Sosial (DINSOS), RSUD Ende. Menurut Sugiyono (2019), sampel adalah sebagian dari ukuran dan karakteristik populasi. penelitian ini menggunakan 75 sampel. Lebih rinci lagi, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: 1). Responden di wilayah Pemerintah Kabupaten Ende yang bertugas pada bagian perencanaan dan keuangan. 2). Mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun. Hal ini dilakukan karena responden telah memiliki waktu untuk mampu mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Data-data peneliti tersebut, dianalisis dengan alat analisis SEM PLS.\



Gambar 1. Diagram Alur

Noted:

PA: Perencanaan Anggaran

KSDM: Kualitas SDM

KD: Kepemimpinan Digital

EK: Efektivitas Kinerja

Dugaan awal pada sebuah penelitian apakah betul atau salah yang dilihat berdasarkan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan adalah definisi dari hipotesis penelitian. Dugaan awal yang ada pada penelitian ini yaitu:

H₀₁: Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende.

Ha₁: Perencanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende.

H₀₂: Kualitas SDM tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende.

Ha₂: Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende. H₀₃: Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende.

H₀₃: Kepemimpinan Digital tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende.

H_{a3}: Kepemimpinan Digital berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende.

H₀₄: Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende.

H_{a4}: Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende.

H₀₅: perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan digital, dan sistem informasi keuangan daerah tidak ada pengaruh positif terhadap efektivitas kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende.

H_{a5}: perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan digital dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Ende.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Outer Model atau Model Pengukuran

Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

No	Pernyataan	tHitung	tTabel	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,531	0,264	Valid
2	Pernyataan 2	0,578	0,264	Valid
3	Pernyataan 3	0,920	0,264	Valid
4	Pernyataan 4	0,514	0,264	Valid
5	Pernyataan 5	0,514	0,264	Valid
6	Pernyataan 6	0,574	0,264	Valid
7	Pernyataan 7	0,855	0,264	Valid
8	Pernyataan 8	0,422	0,264	Valid
9	Pernyataan 9	0,350	0,264	Valid
10	Pernyataan 10	0,570	0,264	Valid
11	Pernyataan 11	0,394	0,264	Valid
12	Pernyataan 12	0,658	0,264	Valid
13	Pernyataan 13	0,837	0,264	Valid
14	Pernyataan 14	0,421	0,264	Valid
15	Pernyataan 15	0,350	0,264	Valid
16	Pernyataan 16	0,565	0,264	Valid
17	Pernyataan 17	0,394	0,264	Valid
18	Pernyataan 18	0,660	0,264	Valid
19	Pernyataan 19	0,329	0,264	Valid
20	Pernyataan 20	0,565	0,264	Valid
21	Pernyataan 21	0,349	0,264	Valid
22	Pernyataan 22	0,660	0,264	Valid
23	Pernyataan 23	0,452	0,264	Valid
24	Pernyataan 24	0,577	0,264	Valid
25	Pernyataan 25	0,676	0,264	Valid
26	Pernyataan 26	0,676	0,264	Valid

Pada uji validitas pada 26 pernyataan pada kuisioner yang menguji variabel X1, X2, X3, X4 dan Y. Variabel X1, X2, dan X4 terdapat masing-masing enam pernyataan sedangkan untuk X3 variabel Y terdapat empat pernyataan sehingga total pernyataan terdapat 26 dengan keterangan valid karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai tabel untuk 75 responden yaitu 0,264 sehingga pernyataan satu sampai dua puluh dua dinyatakan valid.

Uji Reabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,969	22

Berdasarkan hasil uji reabilitas nilai cronbach's alpha sebesar $0,969 > 0,7$ sehingga dinyatakan reabel.

Analisis Inner Model atau Struktural

Tabel 3. Uji R-square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,847 ^a	,717	,705	,631
Predictors: (Constant),X4, X3, X1, X2				

Berdasarkan hasil uji R-square 0,847 sehingga dinyatakan memiliki hubungan atau pengaruh antara variabel X1 hingga X4 dengan variabel Y dengan menunjukkan hubungan yang kuat.

Tabel 4. Uji Q-square Variabel Y dan X1

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	102,068 ^a	16	,000
Likelihood Rasio	72,217	16	,000
Linear-by-Linear Association	29,693	1	,000
N of Valid Cases	75		

Berdasarkan hasil uji Q-square $0,00 < 0,00$ sehingga dinyatakan signifikan dengan model yang baik.

Tabel 5. Variabel Y dan X2

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	124,391 ^a	24	,000
Likelihood Rasio	87,172	24	,000
Linear-by-Linear Association	43,263	1	,000
N of Valid Cases	75		

Berdasarkan hasil uji Q-square $0,00 < 0,00$ sehingga dinyatakan signifikan dengan model yang baik.

Tabel 6. Variabel Y dan X3

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	231,391 ^a	21	,000
Likelihood Ratio	65,172	21	,000
Linear-by-Linear Association	32,263	1	,000
N of Valid Cases	75		

Berdasarkan hasil uji Q-square $0,00 < 0,00$ sehingga dinyatakan signifikan dengan model yang baik.

Tabel 7. Variabel Y dan X4

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	124,391 ^a	24	,000
Likelihood Ratio	87,172	24	,000
Linear-by-Linear Association	43,263	1	,000
N of Valid Cases	75		

Berdasarkan hasil uji Q-square $0,00 < 0,00$ sehingga dinyatakan signifikan dengan model yang baik.

Uji Path Coefficient

Tabel 8. Uji Path Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,938	1,910		2,062	,043
X1	,231	,091	,241	2,846	,003

X2	,128	,139	,160	3,922	,001
X3	,699	,126	,827	5,534	,000
X4	,435	,134	,652	5,432	,000

Berdasarkan hasil pengujian path coefficient nilai signifikan diperoleh apabila $<0,05$, pada x_1 $0,003 < 0,05$ dinyatakan signifikan atau berpengaruh. Pada variabel x_2 $0,001$ sehingga $0,001 < 0,05$. Pada variabel x_3 dinyatakan $0,000 < 0,05$ sehingga signifikan berpengaruh. Pada variabel x_4 $0,001$ sehingga $0,000 < 0,05$.

Pengujian Hipotesis

Tabel 9. Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,938	1,910		2,062	,343
X1	,231	,091	,241	2,846	,003
1 X2	,128	,139	,160	3,922	,001
X3	,699	,126	,827	5,534	,000
X4	,433	,122	,634	4,352	,000

Pada pengujian hipotesis jika dilihat dari nilai signifikan maka pada hubungan x_1 dan y terdapat $0,003 < 0,05$ sehingga dinyatakan variabel x_1 atau perencanaan anggaran berpengaruh pada efektivitas pekerjaan. Pada variabel x_2 dinyatakan $0,001 > 0,05$ sehingga variabel x_2 atau sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan pada efektivitas pekerjaan. Selain itu pada variabel x_3 dinyatakan $0,00 < 0,05$ sehingga x_3 yaitu kepemimpinan digital daerah dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja. Pada variabel x_4 dinyatakan $0,00 < 0,05$ sehingga x_4 yaitu sistem informasi keuangan daerah dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja. Jika dilihat dari nilai t hitung dan t tabel maka untuk variabel x_1 t hitung sebesar $2,846 > 0,264$ sehingga dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan. Pada t hitung x_2 nilainya $3,922 > 0,264$ sehingga dinyatakan berpengaruh, dan pada x_3 nilainya $5,534 > 0,264$ dinyatakan berpengaruh kepemimpinan digital terhadap efektivitas kerja. Pada t hitung x_4 nilainya $4,352 > 0,264$ sehingga dinyatakan berpengaruh sistem informasi keuangan terhadap efektivitas kerja.

Pembahasan

Pada penelitian ini analisis jawaban responden untuk variabel X_1 indeks 90 termasuk pada rentangan tinggi, variabel X_2 kualitas sumber daya manusia dengan indeks 68 termasuk pada rentangan 47-73 yaitu sedang, pada analisis jawaban responden untuk kuisioner variabel X_3 yaitu kepemimpinan digital dengan jumlah termasuk pada rentangan 47-73 yaitu sedang. Selain itu untuk variabel X_4 Pada analisis jawaban indeks 86 termasuk pada rentangan tinggi. Pada analisis jawaban responden untuk variabel terikat yaitu Y diperoleh hasil efektivitas kerja dengan indeks 67 termasuk pada rentangan sedang.

Pada pengujian validitas dan reabilitas diperoleh hasil yaitu uji validitas pada 22 pernyataan pada kuisioner yang menguji variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan Y . Variabel X_1 , X_2 , dan X_4 terdapat masing-masing enam pernyataan sedangkan untuk variabel X_3 dan Y terdapat empat pernyataan sehingga total pernyataan terdapat 26 dengan keterangan valid karena nilai t hitung $>$ t tabel, nilai t tabel untuk 75 responden yaitu 0,264 sehingga pernyataan satu sampai dua puluh dua dinyatakan valid. Sedangkan pada pengujian reabilitas diperoleh hasil dengan nilai cronbach's alpha sebesar $0,969 > 0,7$ sehingga dinyatakan reabel.

Pada pengujian inner model atau model structural pada hasil uji R -square 0,847 sehingga dinyatakan memiliki hubungan atau pengaruh antara variabel X_1 hingga X_4 dengan variabel Y dengan menunjukkan hubungan yang kuat. Selain itu untuk uji Q -square diperoleh nilai $0,00 < 0,00$ sehingga dinyatakan signifikan dengan model yang baik. Sedangkan pada uji path coefficient hasil pengujian nilainya signifikan diperoleh apabila $<0,05$, pada x_1 $0,003 < 0,05$ dinyatakan signifikan atau berpengaruh. Pada variabel X_2 $0,001$ sehingga $0,001 < 0,05$. Pada variabel X_3 dinyatakan $0,000 < 0,05$ sehingga signifikan berpengaruh dan pada variabel X_4 $0,001$ sehingga $0,000 < 0,05$.

Pengujian hipotesis jika dilihat dari nilai signifikan maka pada hubungan X_1 dan y terdapat $0,003 < 0,05$ sehingga dinyatakan variabel X_1 atau perencanaan anggaran berpengaruh pada efektivitas pekerjaan. Pada variabel X_2 dinyatakan $0,001 > 0,05$ sehingga variabel X_2 atau sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan pada efektivitas pekerjaan. Selain itu pada variabel X_3 dinyatakan $0,00 < 0,05$ sehingga X_3 yaitu kepemimpinan digital dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja. Pada variabel X_4 dinyatakan $0,00 < 0,05$ sehingga sistem informasi keuangan

berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Jika dilihat dari nilai t hitung dan t tabel maka untuk variabel x_1 t hitung sebesar $2,846 > 0,264$ sehingga dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan. Pada t hitung X_2 nilainya $3,922 > 0,264$ sehingga dinyatakan berpengaruh, dan pada X_3 nilainya $5,534 > 0,264$ dinyatakan berpengaruh antara sistem informasi keuangan terhadap efektivitas kerja pada variabel X_4 $0,001$ sehingga $0,001 < 0,05$.

Pada penelitian terdahulu oleh Siregar, 2019 dengan judul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimediasi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas SDM mempengaruhi kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, variabel kualitas Anggaran mempengaruhi kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, variabel SIMDA mempengaruhi kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan pengaruh antara variabel kualitas SDM, kualitas Anggaran terhadap kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak dimediasi oleh SIMDA pada SKPD Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian terdahulu oleh Nina, 2023 dengan judul “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja pemerintah. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja pemerintah. Selain itu penelitian terdahulu oleh Firmawaty, 2021 dengan judul “Pengaruh Perencanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju”. Hasil yang diperoleh yaitu perencanaan anggaran yang dilakukan dengan baik akan berpengaruh pada upaya peningkatan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamuju. Kualitas sumber daya manusia yang kompeten dibidang keuangan akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamuju.

Simpulan

Analisis jawaban responden untuk variabel X_1 indeks 90 termasuk pada rentangan tinggi, variabel X_2 kualitas sumber daya manusia dengan indeks 68 termasuk pada rentangan 47-73 yaitu sedang, pada analisis jawaban responden untuk kuisioner variabel X_3 yaitu kepemimpinan digital dengan jumlah termasuk pada rentangan 47-73 yaitu sedang. Selain itu untuk variabel X_4 Pada analisis jawaban indeks 86 termasuk pada rentangan tinggi. Pada analisis jawaban responden untuk variabel terikat yaitu Y diperoleh hasil efektivitas kerja dengan indeks 67 termasuk pada rentangan sedang.

Pada pengujian validitas dan reabilitas diperoleh hasil yaitu uji validitas pada 22 pernyataan pada kuisioner yang menguji variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan Y . Variabel X_1 , X_2 , dan X_4 terdapat masing-masing enam pernyataan sedangkan untuk variabel X_3 dan Y terdapat empat pernyataan sehingga total pernyataan terdapat 26 dengan keterangan valid karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai t_{tabel} untuk 75 responden yaitu $0,264$ sehingga pernyataan satu sampai dua puluh dua dinyatakan valid. Sedangkan pada pengujian reabilitas diperoleh hasil dengan nilai cronbach's alpha sebesar $0,969 > 0,7$ sehingga dinyatakan reabel.

Pada pengujian inner model atau model structural pada hasil uji R-square $0,847$ sehingga dinyatakan memiliki hubungan atau pengaruh antara variabel X_1 hingga X_4 dengan variabel Y dengan menunjukkan hubungan yang kuat. Selain itu untuk uji Q-square diperoleh nilai $0,00 < 0,00$ sehingga dinyatakan signifikan dengan model yang baik. Sedangkan pada uji path coefficient hasil pengujian nilainya signifikan diperoleh apabila $< 0,05$, pada x_1 $0,003 < 0,05$ dinyatakan signifikan atau berpengaruh. Pada variabel X_2 $0,001$ sehingga $0,001 < 0,05$. Pada variabel X_3 dinyatakan $0,000 < 0,05$ sehingga signifikan berpengaruh dan pada variabel X_4 $0,001$ sehingga $0,000 < 0,05$.

Pengujian hipotesis jika dilihat dari nilai signifikan maka pada hubungan X_1 dan y terdapat $0,003 < 0,05$ sehingga dinyatakan variabel X_1 atau perencanaan anggaran berpengaruh pada efektivitas pekerjaan. Pada variabel X_2 dinyatakan $0,001 > 0,05$ sehingga variabel X_2 atau sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan pada efektivitas pekerjaan. Selain itu pada variabel X_3 dinyatakan $0,00 < 0,05$ sehingga X_3 yaitu kepemimpinan digital dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja. Pada variabel X_4 dinyatakan $0,00 < 0,05$ sehingga sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Jika dilihat dari nilai t hitung dan t tabel maka untuk variabel x_1 t hitung sebesar $2,846 > 0,264$ sehingga dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan. Pada t hitung X_2 nilainya $3,922 > 0,264$ sehingga dinyatakan berpengaruh, dan pada X_3 nilainya $5,534 > 0,264$ dinyatakan berpengaruh antara sistem informasi keuangan terhadap efektivitas kerja pada variabel X_4 $0,001$ sehingga $0,001 < 0,05$.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran memiliki dampak pengaruh terhadap efektivitas kerja. Maka dari itu, Biro Perekonomian Setda Kabupaten Ende perlu mempertahankan atau

meningkatkan kualitas perencanaan anggaran agar dapat meningkatkan efektivitas kerja. Dan disarankan bagi Biro Perekonomian Setda Kabupaten Ende agar dapat lebih meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan memfasilitasi para pegawai dengan mengikuti bimtek atau seminar-seminar mengenai Penyerapan Anggaran. Peneliti di masa depan juga diharapkan dapat menambahkan variabel lain, tidak hanya perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan system informasi keuangan daerah, serta faktor-faktor independen, memoderasi, dan intervening. Selain itu, disarankan untuk mengembangkan kuesioner penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul, H. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salemba Empat.
- [2] Aldita, A. F., & Muniruddin, S. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Pemahaman atas Sistem Akuntansi, Lingkungan Birokrasi dan Komitmen Organisasi terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD Kota Langsa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 3(1), 82–95.
- [3] Alumbida, D. I., Saerang, D. P. E., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. ACCOUNTABILITY, 5(2), 141–151.
- [4] Agus Tri Basuki & Nano Prawoto (2015). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS), Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi). Yogyakarta: Raja Grafindo Persada
- [5] Asmadewa, I. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja: Studi pada Pemerintah Pusat. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- [6] Dewi, N., Dwirandra, A., & Wirakusuma, M. G. (2017). Kemampuan komitmen organisasi memoderasi pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi SDM pada penyerapan anggaran pemerintah kabupaten Tabanan. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 6(4), 1609–1638.
- [7] Dougherty and Pfaltzgraff. 1990. Contending Theories Of International Relations. A Comprehensive Survey 5th Edition.
- [8] Fajar, N dan Arfan, M. 2017. Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol.10 No.2, pp: 95- 102
- [9] Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. California Management Review, 25(3), 88–106..
- [10] Ghazali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [11] H.Candra Wijaya (2017). Perilaku Organisasi, Medan, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI) Jl. Sesar Komplek Citra Mulia Blok D. 14 Medan
- [12] Mardi, M.Si. Sistem Informasi Akuntansi, (Jakarta: Ghania Indonesia, 2011)
- [13] Mahmudi, F. (2016). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Pres.
- [14] Malahayati, C., & Islahuddin, H. B. (2015). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (skpd) pada pemerintah kota banda aceh. Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 4(1).
- [15] Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- [16] Metha, C.R., & Patel, N. R. (2011). IMB SPSS Exact Tests. 2011, January 1996, 1-236.
- [17] Mulyadi, “Sistem Informasi Akuntansi”, Salemba Empat : 2008.
- [18] Mulyadi. Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar, (Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- [19] Mutmainna, M., & Iqbal, M. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 7(1), 120–132.
- [20] Natalia, dan Ningsih, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Wook Global Technology”, Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol.8. Ngumar, Lasso. Metode data Kuantitatif , 2016.
- [21] Nugroho, R., & Alfari, S. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). Jurnal BPPK, 10(1), 22–37.
- [22] Putri, K. M. R., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran

- (Survei pada SKPD di wilayah Pemerintah daerah provinsi Bali). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
- [23] Rahayu, S. P. (2020). Pengaruh perencanaan anggaran kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran tahun 2019 (Studi kasus: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman). Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi.
- [24] Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada opd provinsi sumatera barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(2), 710–726.
- [25] Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 10(1).
- [26] Robbins, S. dan Timothy A, J. (2017). Organizational Behavior . edisi ketujuh belas Jakarta: Global Edition .
- [27] Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan
- [28] Sedarmayanti. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- [29] Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- [30] Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- [31] Winarno W.W. “Sistem Informasi Akuntansi Edisi Kedua”, (Yogyakarta: STIMYKPN, 2006)
- [32] Zaki, Baridwan. Sistem Informasi Akuntansi. BPFE: Yogyakarta, 2004.
- [33] Zarinah, M. 2015. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. Tesis. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala.
- [34] Zuhairi et al. Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers 2016)